



**RENCANA KERJA
KECAMATAN KEDUNGDUNG
KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
2022**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Hal ini tertuang dalam Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai Perangkat Daerah, Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang menyusun Renja Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang Tahun 2023 yang mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

- a. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari tujuan, sasaran dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan sebelumnya dalam Renstra Perangkat Daerah;
- b. Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai dokumen penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun berkenaan;
- c. Rencana Kerja merupakan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan;
- d. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sendiri terdiri dari beberapa tahapan utama yaitu:

- a. Persiapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah
- b. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah

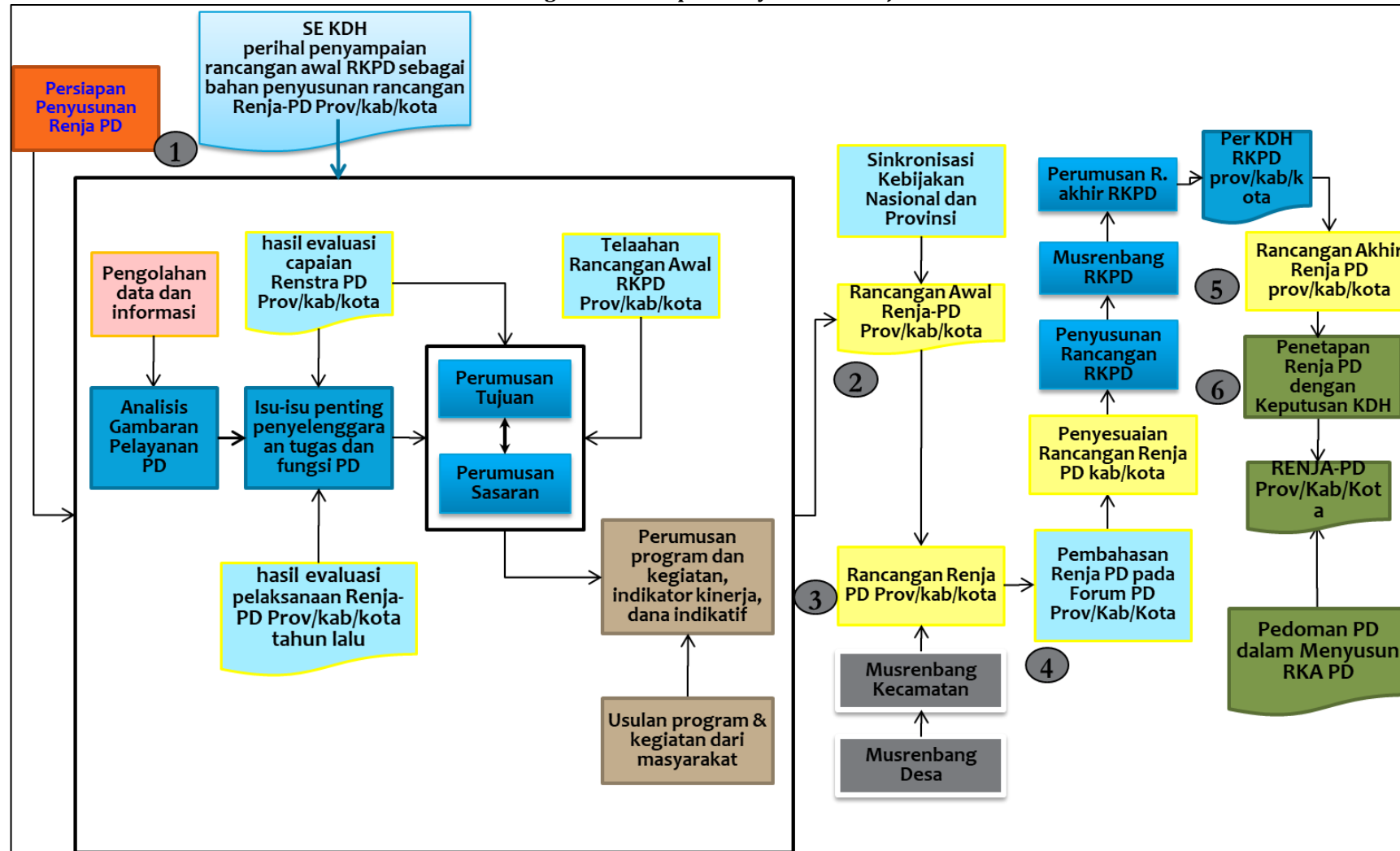
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah yang difasilitasi oleh Kecamatan Kedungdung
- e. Perumusan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah
- f. Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Setelah melalui beberapa tahapan dalam penyusunannya, Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah disempurnakan dan menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang definitif dengan kriteria sebagai berikut:

1. Merupakan dokumen penjabaran Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023;
2. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2023;
3. Program dalam Rencana Kerja harus sesuai dengan program prioritas Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2023;
4. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
5. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju Tahun 2024.

Adapun bagan alir tahapan penyusunan dan kedudukan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja



Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang disusun sejalan dengan Tema RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2023 yaitu **“Peningkatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dalam mendukung Pemantapan Pemulihan Ekonomi menuju Sampang Hebat Bermartabat”**, dan penjabaran dari beberapa sasaran Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang yang tertuang dalam Renstra yaitu

1. Sasaran 1 yaitu Meningkatkan kemajuan dan kemandirian desa
2. Sasaran 2 yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan public
3. Sasaran 3 yaitu meningkatnya tata kelola pemerintahan dan;
4. Sasaran 4 yaitu Meningkatkan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia

- tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
19. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

- Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
29. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Jawa Timur 2005–2020;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Jawa Timur 2011–2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
33. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang nomor 7 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sampang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang nomor 29 tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 29);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 2);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3);
40. Peraturan Bupati Sampang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Kedungdung Tahun 2023 adalah menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang Tahun 2023.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kedungdung Tahun 2023 secara umum adalah:

1. Tersedianya dokumen penjabaran Renstra Kecamatan Kedungdung Tahun 2019-2024 dan RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2023;
2. Tersedianya dokumen acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023;
3. Tersedianya dokumen yang digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2023, meliputi:

BABI PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1).

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang meliputi Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung beserta Program dan Kegiatannya.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 dimaksudkan untuk menilai sekaligus menganalisa pelaksanaan program maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang. Evaluasi ini meliputi evaluasi kinerja Rencana Kerja Tahun 2021 dan Renstra Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Dari evaluasi ini dapat diketahui secara langsung capaian kinerja program dan kegiatan sampai dengan tahun ke-lima pelaksanaan Renstra 2019-2024.

Dengan demikian ,dapat dilihat faktor-faktor pendorong keberhasilan dan faktor kendala yang terjadi selama melaksanakan program dan kegiatan yang telah tersusun dalam Renstra Kecamatan Kedungdung.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan dan Pencapaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2022

Pada tahun anggaran 2022 Anggaran dilaksanakan oleh Kecamatan Kedungdung sebesar **Rp. 3.502,384,581** dengan total terealisasi sebesar **Rp3.309.816.088,- (95%)**. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan **5 (Lima) program dan 12 (Dua Belas) kegiatan** dengan rincian sebagai berikut:

No.	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	Alokasi Biaya			Output/Keluaran			
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Uraian	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Belanja Daerah	3.502.384.581,-	3.309.816.088,-	95				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.392.267.629,-	3.199.731.088,-	94				
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.023.028,-	11.897.500,-	99	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu	100		
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.445.609,-	1.444.000,-	100	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.513.310,-	1.413.000,-	93	Jumlah Dokumen RKA Tahun 2021 yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	

No.	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	Alokasi Biaya			Output/Keluaran			
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Uraian	Target	Realisasi	%
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA Tahun 2022 yang disusun	1.409.350,-	1.407.000,-	100	Jumlah Dokumen Perubahan RKA Tahun 2021 yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.554.650,-	4.553.000,-	100	Jumlah Dokumen DPA Tahun 2021 yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.444.651,-	1.437.500,-	100	Jumlah Dokumen Perubahan DPA Tahun 2021 yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.655.458,-	1.643.000,-	99	Jumlah Dokumen LPPD, LKPJ, SAKIP LKjiP Perangkat Daerah yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.867.588.263,-	2.703.056.382,-	94	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu	100		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.862.216.620,-	2.697.794.519,-	94	Jumlah pegawai selama 1 tahun	34 Pegawai	34 Pegawai	

No.	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	Alokasi Biaya			Output/Keluaran			
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Uraian	Target	Realisasi	%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.355.832,-	2.314.000,-	98	Jumlah SPJ yang diverifikasi	12 spj	12 spj	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	873.372,-	807.863,-	92	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun	1 laporan	1 laporan	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.142.439,-	2.140.000,-	100	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Laporan Semesteran SKPD yang disusun	3 laporan	3 laporan	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.018.675,-	1.880.000,-	47	Presentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	1 orang	1 orang	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	4.018.675,-	1.880.000,-	47	Jumlah ASN yang mengikuti bintek implementasi perundang-undangan	1 orang	1 orang	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	77.992.172,-	67.340.000,-	86	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.203.540,-	8.199.000,-	100	Jumlah Komponen Listrik yang	9 macam	9 macam	

No.	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	Alokasi Biaya			Output/Keluaran			
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Uraian	Target	Realisasi	%
					disediakan			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.200.000,-	6.159.000,-	99	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	60 macam	60 macam	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.154.303,-	5.151.250,-	100	Jumlah peralatan rumah tangga yang sediakan	161 buah	161 buah	
	Penyediaan bahan logistic kantor	4.272.694,-	4.230.250,-	99	Jumlah bahan logistic kantor yang disediakan	75 buah	75 buah	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.693.100,-	3.691.500,-	100	Jumlah barang cetakan yang disediakan	6 macam 10000 lbr	6 macam 5600 lbr	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1.800.000,-	1.800.000,-	100	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	12 bln	12 bln	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.400.000,-	2.400.000,-	100	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 ob	60 ob	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46.268.535,-	35.709.000,-	77	Jumlah Rapat koordinasi	385 ob	315 ob	
					Jumlah Konsultasi Luar Daerah	64 ok	64 ok	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	125.281.800,-	117.487.569,-	94	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam	100		

No.	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	Alokasi Biaya			Output/Keluaran			
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Uraian	Target	Realisasi	%
					kondisi baik			
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	66.000.000,-	61.200.000,-	93	Jumlah kendaraan dinas R4 yang disewa	12 bln	12 bln	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.281.800,-	56.287.569,-	95	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	3 macam	3 macam	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76.540.261,-	71.775.137,-	94	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.845.261,-	2.843.000,-	100	Jumlah surat yang terkirim	500 surat	573 surat	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.605.000,-	26.932.137,-	85	Cakupan penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet	12 bln	12 bln	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	42.000.000,-	42.000.000,-	100	Cakupan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	48 ob	48 ob	

No.	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	Alokasi Biaya			Output/Keluaran			
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Uraian	Target	Realisasi	%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	224.150.000,-	221.563.500,-	99	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.850.000,-	2.288.500,-	59	Jumlah Kendaraan Dinas yang mendapatkan perizinan kendaraan	11 unit	9 unit	
	Pemeliharaan Mebel	2.720.000,-	2.720.000,-	100	Jumlah Meubelair yang dipelihara	20 unit	20 unit	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.050.000,-	8.005.000,-	99	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yg dipelihara	21 unit	18 unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	209.530.000,-	208.550.000,-	100	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	1 unit	1 unit	
	Penataan Organisasi	4.763.430,-	4.731.000,-	99	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100		
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4.763.430,-	4.731.000,-	99	Jumlah dokumen SKM	1 dokumen	1 dokumen	
					Jumlah Promosi pelayanan Pablik	3 kegiatan	0 kegiatan	

No.	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	Alokasi Biaya			Output/Keluaran			
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Uraian	Target	Realisasi	%
					Perangkat Daerah			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.443.980,-	4.440.500,-	100				
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4.443.980,-	4.440.500,-	100	Persentase rekomendasi administrasi Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti tepat waktu	100		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	4.443.980,-	4.440.500,-	100	Jumlah layanan administrasi umum yang diproses	5 dokumen	5 dokumen	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	68.376.176	68.354.500	100				
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	68.376.176	68.354.500	100	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	64		
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	27.111.508,-	27.093.000,-	100	Jumlah Dokumen Musrenbangcam yang dihasilkan	1 dokumen	1 dokumen	
					Jumlah Musrenbangcam yang	1 kali	1 kali	

No.	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	Alokasi Biaya			Output/Keluaran			
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Uraian	Target	Realisasi	%
					dilaksanakan			
					Jumlah Musrenbangcam yang dilaksanakan	1 kali	1 kali	
	Peningkatan Efektifitas KegiatanPemberdayaan Masyarakat diWilayah Kecamatan	41.264.668,-	41.261.500,-	100	Jumlah Desa binaan PKK	3 desa	3 desa	
					Jumlah Rapat bulanan PKK	12 bulan	12 bulan	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15.420.000,-	15.420.000,-	100				
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	15.420.000,-	15.420.000,-	100	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan	64		
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	15.420.000,-	15.420.000,-	100	Jumlah Poskamling dan Siskamling yang aktif	18 desa	18 desa	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	21.876.796,-	27.870.000,-	100				
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	21.876.796,-	27.870.000,-	100	Persentase Partisipasi masyarakat dalam	64		

No.	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	Alokasi Biaya			Output/Keluaran			
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Uraian	Target	Realisasi	%
					kegiatan pembangunan			
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	13.240.000,-	13.240.000,-	100	Jumlah Desa yang dilakukan Evaluasi APBDesnya	18 desa	18 desa	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8.636.796,-	8.630.000,-	100	Jumlah Desa yang dilakukan Pembinaan Administrasinya	18 desa	18 desa	
	Jumlah	3.502.384.581,-	3.309.816.088,-	96				

Tabel 2.1

Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Tahun 2021 Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang

Rata-rata realisasi kinerja program/kegiatan adalah 95 % atau dapat dikategorikan sangat baik.

2.3 Evaluasi Pelaksanaan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Renstra Kecamatan Kedungdung sampai dengan Tahun 2021 dilaksanakan dalam rangka mendukung capaian sasaran RPJMD 2019-2024 yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut terealisasi sampai dengan tahun anggaran berjalan. Dalam Renstra Kecamatan Kedungdung Tahun 2019-2024 memuat 4 program dan 15 kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun.

Adapun rekapitulasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Kedungdung sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Kedungdung dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d. Tahun 2020

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Program/ Kegiatan pada akhir periode Renstra Perangkat Tahun 2019 - 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (2019-2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Nilai IKM Kecamatan Kedungdung		81						
	Belanja Tidak Langsung (BTL)			4,863,684,715						
	Gaji dan Tunjangan	Pembayaran gaji dan tunjangan		4,453,850,477						
	BELANJA LANGSUNG (BL)			1,042,923,470						

1	Program Pelayanan Administrasi dan jasa Perkantoran	Presentase pemenuhan layanan administrasi dan jasa		294,730,500						
	Pelayanan Administrasi dan Jasa	Jumlah surat terkirim		193,385,250						
	Perkantoran	Jumlah penyediaan jasa dan pengadaan instalasi listrik, air dan komunikasi								
		Jumlah kendaraan dinas yang mendapatkan								
		perizinan								

		Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman rapat dan tamu								
		Jumlah tenaga kontrak daerah								
		Jumlah petugas kebersihan kantor								
		Jumlah pemenuhan kebutuhan surat								
		kabar								
01.02.	Penyediaan Sarana Administrasi	Jumlah ATK yang dibutuhkan		64,243,250						
	Perkantoran									
		Jumlah pemenuhan kebutuhan barang cetakan								

		Jumlah pemenuhan kebutuhan barang								
		penggandaan								
		Jumlah pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik								
		Jumlah alat kebersihan dan alat pembersih								
01.03.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas keluar		37,102,000						
		daerah								

		Jumlah pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas dalam daerah								
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		501,536,070						
02.01.	Pembangunan /Rehab/ Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara		181,783,000						
		Jumlah rehab berat gedung kantor								
02.02.	Pembangunan /Rehab/ Pemeliharaan Rumah Jabatan	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara		34,755,000						

02.03.	Pengadaan/Pe meliharaan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas R4 yang disediakan		143,000,000						
	Operasional									
02.04.	Pengadaan/Pe meliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah pengadaan peralatan kantor		141,998,070						
	Kantor									
		Jumlah pengadaan perlengkapan								
		kantor								
		Pemeliharaan perlengkapan								
		kantor								
		Jumlah pengadan kebutuhan								
		mebeler								

		Jumlah pemeliharaan rutin berkala								
		meubeler								
		Jumlah pengadaan								
		komputer								
		Pemeliharaan peralatan								
		kantor								
		Jumlah spanduk								
		/umbul umbul/ bendera yang disediakan								

4	Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan pelayanan publik yang baik dan tepat waktu		63,870,500						
04.01.	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Jumlah dokumen SAKIP dan LAKIP		13,740,650						
		Jumlah laporan semesteran								
		Jumlah laporan keuangan akhir tahun								

04.02.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen Renstra, Renja, RKA dan DPA SKPD		16,040,650						
04.03.	Peningkatan Pelayanan Informasi	Jumlah Dokumen IKM perangkat		37,270,000						
	Publik	daerah								
		Jumlah promosi pelayanan publik perangkat daerah								
7	Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Persentase rekomendasi administrasi pelayanan umum yang ditindaklanjuti tepat waktu		182,826,250						
		Persentase pengaduan masyarakat yang								

		ditindaklanjuti								
		Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan								
		pembangunan								
07.01.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Lingkungan Sehat	Jumlah RT yang memenuhi sarana dan prasarana		93,777,000						
	Perumahan									
07.02.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat terhadap Keamanan	Jumlah desa yang mendapatkan perlindungan masyarakat		7,335,500						
	Lingkungan									

07.03.	Pembinaan dan Monitoring Pelayanan Administrasi	Jumlah desa dengan administrasi yang baik		23,877,950						
	Desa									
07.04.	Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang RKPD di	Jumlah pra musrenbangcam yang dilaksanakan		43,321,300						
	Kecamatan									
		Jumlah musrenbangcam yang								
		dilaksanakan								
		Laporan hasil musrenbangcam yang disusun								
07.05.	Fasilitasi Administrasi Pelayanan Umum	Persentase permohonan administrasi layanan umum		5,221,500.00						

	Meningkatnya kualitas pelayanan publik tingkat kecamatan	Nilai IKM Kecamatan Kedungdung	83		81,5	80,97		82		
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Baik dan Tepat Waktu	100%		3,433,511,907.00	3,268,542,671.00	95%	3,462,892,209.00	6,731,434,880.00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu	100%		24,466,068.00	23,639,100.00	97%	12,023,028.00	35,662,128.00	

7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen		3,716,830.00	3,705,400.00	100%	1,445,609.00	5,151,009.00	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD	1 dokumen		3,798,178.00	3,635,000.00	96%	1,513,310.00	5,148,310.00	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA - SKPD	1 dokumen		3,681,483.00	3,592,800.00	98%	1,409,350.00	5,002,150.00	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD	1 dokumen		3,916,631.00	3,406,400.00	87%	4,554,650.00	7,961,050.00	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA - SKPD	1 dokumen		3,681,483.00	3,640,000.00	99%	1,444,651.00	5,084,651.00	

7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah (LPPD, LKPJ, SAKIP, RB)	3 dokumen		5,671,463.00	5,659,500.00	100%	1,655,458.00	7,314,958.00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100%		2,897,159,235.00	2,759,934,571.00	95%	2,950,767,093.00	5,710,701,664.00	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai ASN	34 orang		2,879,899,580.00	2,746,452,996.00	95%	2,947,215,450.00	5,693,668,446.00	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi SKPD	Jumlah dokumen verifikasi keuangan	12 dokumen		6,684,717.00	6,657,200.00	100%	2,355,823.00	9,013,023.00	

7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 dokumen		2,806,021.00	2,789,250.00	99%	613,372.00	3,402,622.00	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan bulanan / triwulanan / semesteran SKPD	16 dokumen		3,896,070.00	3,732,225.00	96%	582,439.00	4,314,664.00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100%		7,728,675.00	Rp -	0%	4,018,675.00	4,018,675.00	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek implementasi perundang - undangan	1 ASN		7,728,675.00	Rp -	0%	4,018,675.00	4,018,675.00	

7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100%		66,869,206.00	58,001,575.00	87%	71,688,172.00	129,689,747.00	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang disediakan	146 buah		4,361,242.00	3,659,800.00	84%	8,203,540.00	11,863,340.00	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	90 buah					6,200,000.00	6,200,000.00	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	220		10,872,847.00	9,418,000.00	87%	5,154,303.00	14,572,303.00	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor						4,272,694.00	4,272,694.00	

7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	a. Jumlah barang cetakan yang disediakan	139 unit		6,506,582.00	4,366,775.00	67%	3,693,100.00	8,059,875.00	
		b. Jumlah barang penggandaan yang disediakan	5275 lembar							-
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	12 eksemplar		1,800,000.00	1,800,000.00	100%		1,800,000.00	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah pemenuhan makanan dan minuman kunjungan tamu	120 Ok		2,400,000.00	2,400,000.00	100%	2,400,000.00	4,800,000.00	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	a. Jumlah kebutuhan BBM	420 liter		40,928,535.00	36,357,000.00	89%		36,357,000.00	

		b. Jumlah pemenuhan makanan dan minuman rapat	420 orang						39,964,535.00	
		c. Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	108 orang						-	
		d. Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	5 orang					39,964,535.00	0	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100%		132,678,622.00	128,500,000.00	97%		128,500,000.00	
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan R4 yang disewa	1 unit		66,000,000.00	62,400,000.00	95%	66,000,000.00	128,400,000.00	

7.01.06.1.2.07.05	Pengadaan mebel	Jumlah mebel yang disediakan	22 unit		26,257,252.00	26,050,000.00	99%	53,031,550.00	79,081,550.00	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin	4 unit		40,421,370.00	40,050,000.00	99%	76,450,261.00	116,500,261.00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan daerah yang difasilitasi	100%		68,471,852.00	62,611,025.00	91%	2,845,261.00	65,456,286.00	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	500 surat		2,607,921.00	2,596,400.00	100%	31,605,000.00	34,201,400.00	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pemenuhan listrik, air dan komunikasi	12 bulan		32,863,930.00	27,014,625.00	82%	42,000,000.00	69,014,625.00	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kebersihan, tenaga administrasi dan tenaga waker	48 ob		33,000,000.00	33,000,000.00	100%	224,150,000.00	257,150,000.00	

7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100%		235,813,600.00	232,173,500.00	98%	3,850,000.00	236,023,500.00	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	a. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	11 unit		3,850,000.00	977,000.00	25%	2,720,000.00	3,697,000.00	
		b. Jumlah kendaraan dinas yang mendapatkan perizinan kendaraan	4 unit						-	

7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan mebel	Jumlah meubelair yang dipelihara	22 unit		2,720,000.00	2,720,000.00	100%	8,050,000.00	10,770,000.00	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4 unit		8,050,000.00	7,975,000.00	99%	8,050,000.00	16,025,000.00	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara	2 unit		221,193,600.00	220,501,500.00	100%	209,530,000.00	430,031,500.00	
7.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100%		324,650.00	323,900.00	100%	4,763,430.00	5,087,330.00	
7.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	a. Jumlah dokumen SKM	1 dokumen		324,650.00	323,900.00	100%	4,763,430.00	5,087,330.00	

		b. Jumlah promosi pelayanan perangkat daerah	3 kali							-
7.01.02.2.02	Penyelenggara n Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase rekomendasi administrasi pelayanan umum yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%		3,707,024.00	3,341,500.00	90%	4,443,980.00	7,785,480.00	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase permohonan administrasi layanan umum yang diproses	100%		3,707,024.00	3,341,500.00	90%	4,443,980.00	7,785,480.00	

7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan	100%		71,072,551.00	71,051,725.00	100%	68,376,176.00	139,427,901.00	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Jumlah usulan program kegiatan pembangunan di desa yang difasilitasi	18 desa		29,633,455.00	29,614,500.00	100%	27,111,508.00	56,726,008.00	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah PKK desa binaan yang tertib administrasinya	2 desa		41,439,096.00	4,143,725.00	10%	41,264,668.00	45,408,393.00	

7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan gangguan kamtibmas	100%		54,450,000.00	54,450,000.00	100%	15,420,000.00	69,870,000.00	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah siskamling yang aktif	18 desa		54,450,000.00	54,450,000.00	100%	15,420,000.00	69,870,000.00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase kualitas tata kelola penataan desa	100%		24,310,252.00	24,309,100.00	100%	21,876,796.00	46,185,896.00	

7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah peraturan desa dan peraturan kepala desa yang disusun	18 desa		21,574,990.00	21,574,000.00	100%	13,240,000.00	34,814,000.00	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina tertib administrasinya	18 desa		2,735,262.00	2,735,100.00	100%	8,636,796.00	11,371,896.00	

2.4 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang

Analisis terhadap indikator kinerja pelayanan harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan. Berdasarkan Renstra Perubahan 2019-2024 target dan realisasi indikator sasaran yang mencerminkan indikator kinerja pelayanan Kecamatan Kedungdung dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang

No.	Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan Kedungdung	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks Desa Membangun			64	66	68	70	64	-	68	68	
2	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan			64	66	68	70	64	66	68	68	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat			81	82	83	84	80,97	82,05	82	83	
4	Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik			100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum			20	20	20	20	20	20	20	20	

2.5 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Sampang

Kecamatan Kedungdung sebagai pelaksana pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan mengacu pada tugas pokok dan fungsi lembaga sebagaimana diatur Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sampang. Pelayanan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan.

Sebagaimana termuat dalam Renstra Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, isu-isu strategis yang dihadapi Kecamatan Kedungdung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama kurun waktu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang kurang memadai;
2. SDM pada Kecamatan Kedungdung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih belum optimal;
3. Penggunaan teknologi informasi terhadap proses pelayanan yang masih belum maksimal.

2.6 Faktor – faktor Kunci Keberhasilan

Faktor-faktor kunci pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kedungdung berhasil mencapai hasil-hasil yang direncanakan sebagai berikut :

1. Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, Peraturan menteri dan peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Kedungdung secara ideal;
2. Komitmen pemerintah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien;
3. Perkembangan teknologi dan informasi.

2.7 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Sampang tahun 2023 dilakukan melalui proses membandingkan antara usulan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2023 dengan kebutuhan riil Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang pada tahun tersebut.

Hal ini dilakukan dalam rangka mengakomodir usulan-usulan pelaksanaan pelayanan yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah yang dikompilasikan dengan kebutuhan riil dengan tujuan menetapkan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2023 yang merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan Tupoksi Kecamatan di Kabupaten Sampang. Review tersebut di gambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Sampang

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2023					HASIL ANALISA KEBUTUHAN KECAMATAN KEDUNDUNG TAHUN 2023				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Baik dan Tepat Waktu	100%	3,216,144,192,-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Baik dan Tepat Waktu	100%	3,216,144,192,-
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Presentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu	100%	6,399,259,-	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Presentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu	100%	6,399,259,-
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Kedungdung	a. Jumlah Dokumen Renja SKPD b. Jumlah Dokumen Renstra SKPD	2 Dok	1,995,438,-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Kedungdung	c. Jumlah Dokumen Renja SKPD d. Jumlah Dokumen Renstra SKPD	2 Dok	1,995,438,-
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Kedungdung	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 Dok	1,057,428,-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Kedungdung	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 Dok	1,057,428,-
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Kedungdung	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dok	345,420,-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Kedungdung	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dok	345,420,-
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kec. Kedungdung	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dok	1,023,924,-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kec. Kedungdung	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dok	1,023,924,-
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kec. Kedungdung	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dok	276,130,-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kec. Kedungdung	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dok	276,130,-
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kedungdung	Jumlah Dokumen LKPJ, LPPD, dan Dokumen SAKIP SKPD	3 Dok	1,700,919,-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kedungdung	Jumlah Dokumen LKPJ, LPPD, dan Dokumen SAKIP SKPD	3 Dok	1,700,919,-
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Presentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu	100%	2,948,044,810,-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Presentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu	100%	2,948,044,810,-
7.01.01.2.02.	Penyediaan Gaji dan	Kec. Kedungdung	Jumlah ASN	34 ASN	2.947.212.710-	Penyediaan Gaji dan	Kec. Kedungdung	Jumlah ASN	34 ASN	2.947.212.710-

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2023					HASIL ANALISA KEBUTUHAN KECAMATAN KEDUNDUNG TAHUN 2023				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
01	Tunjangan ASN	dung				Tunjangan ASN	dung			
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Kedungdung	Jumlah ATK yang dibutuhkan	450 buah	0,-	Penyediaan Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Kedungdung	Jumlah ATK yang dibutuhkan	450 buah	0,-
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Kedungdung	Jumlah Dokumen SPJ SKPD	12 Bulan	0-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Kedungdung	Jumlah Dokumen SPJ SKPD	12 Bulan	0-
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Kedungdung	Jumlah Dokumen Akhir Tahun	1 Dok	626,800-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Kedungdung	Jumlah Dokumen Akhir Tahun	1 Dok	626,800-
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec. Kedungdung	Jumlah Dokumen Laporan Bulanan, Triwulan, Semester	16 Dok	205,300-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec. Kedungdung	Jumlah Dokumen Laporan Bulanan, Triwulan, Semester	16 Dok	205,300-
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Presentase Aparatur yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Aparatur	100%	3,993,250,-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Presentase Aparatur yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Aparatur	100%	3,993,250,-
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kec. Kedungdung	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek/ Konsultasi/ Seminar	1 ASN	3,993,250,-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kec. Kedungdung	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek/ Konsultasi/ Seminar	1 ASN	3,993,250,-
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase Pemenuhan Kebutuhan Administrsai Perkantoran	100%	66,178,943,-	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase Pemenuhan Kebutuhan Administrsai Perkantoran	100%	66,178,943,-
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Kedungdung	Jumlah komponen instalasi listrik	146 buah	5,000,361,-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Kedungdung	Jumlah komponen instalasi listrik	146 buah	5,000,361,-
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	90 buah	6,200,000,-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	90 buah	6,200,000,-
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Kedungdung	Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga yang disediakan	148 buah	0,-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Kedungdung	Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga yang disediakan	148 buah	0,-

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2023					HASIL ANALISA KEBUTUHAN KECAMATAN KEDUNDUNG TAHUN 2023				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah kebutuhan alat tulis kantor	249 buah	4.999,232,-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah kebutuhan alat tulis kantor	249 buah	4.999,232,-
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Kedungdung	Jumlah barang cetak dan penggandaan	5275 lembar	3.418,100,-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Kedungdung	Jumlah barang cetak dan penggandaan	5275 lembar	3.418,100,-
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Kedungdung	Jumlah pemenuhan bahan bacaan	12 Bulan	1.800.000,-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Kedungdung	Jumlah pemenuhan bahan bacaan	12 Bulan	1.800.000,-
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Kedungdung	Jumlah pemenuhan kebutuhan mamin tamu	60 ok	4,800,000,-	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Kedungdung	Jumlah pemenuhan kebutuhan mamin tamu	60 ok	4,800,000,-
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Kedungdung	a. Jumlah Mamin rapat dinas b. Jumlah rapat koordinasi dalam daerah yang diikuti c. Jumlah rapat koordinasi luar daerah yang diikuti	420 ok 108 ok 5 ok	39.961.250,-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Kedungdung	d. Jumlah Mamin rapat dinas e. Jumlah rapat koordinasi dalam daerah yang diikuti f. Jumlah rapat koordinasi luar daerah yang diikuti	420 ok 108 ok 5 ok	39.961.250,-
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Presentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	93,815,920,-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Presentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	93,815,920,-
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Kedungdung	Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang disediakan	1 unit	66.000.000,-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Kedungdung	Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang disediakan	1 unit	66.000.000,-
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kec. Kedungdung	Jumlah Meubelair yang diadakan	22 unit	0,-	Pengadaan Mebel	Kec. Kedungdung	Jumlah Meubelair yang diadakan	22 unit	0,-
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Kedungdung	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	4 Unit	27,815,920,-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Kedungdung	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	4 Unit	27,815,920,-
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	74,136,813,-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	74,136,813,-
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Kec. Kedungdung	Jumlah surat terkirim	500 Surat	2,421,813,-	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Kec. Kedungdung	Jumlah surat terkirim	500 Surat	2,421,813,-
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumer Daya	Kec. Kedungdung	Pemenuhan kebutuhan air, listrik dan internet	12 Bulan	29,715,000,-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumer Daya	Kec. Kedungdung	Pemenuhan kebutuhan air, listrik dan internet	12 Bulan	29,715,000,-

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2023					HASIL ANALISA KEBUTUHAN KECAMATAN KEDUNGUNG TAHUN 2023				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
	Air dan Listrik	dung				Air dan Listrik	dung			
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Kedungdung	Jumlah tenaga kebersihan dan Penjaga Malam	48 ob	42.000.000,-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Kedungdung	Jumlah tenaga kebersihan dan Penjaga Malam	48 ob	42.000.000,-
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Kedungdung	Presentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	22,920,000,-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Kedungdung	Presentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	22,920,000,-
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Kedungdung	Jumlah kendaraan dinas yang memperoleh jasa perizinan	11 Unit	3,150,000,-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Kedungdung	Jumlah kendaraan dinas yang memperoleh jasa perizinan	11 Unit	3,150,000,-
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Kec. Kedungdung	Jumlah Meubelair yang dipelihara	20 Unit	2,720,000,-	Pemeliharaan Mebel	Kec. Kedungdung	Jumlah Meubelair yang dipelihara	20 Unit	2,720,000,-
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Kedungdung	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	24 Unit	8.050.000,-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Kedungdung	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	24 Unit	8.050.000,-
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Kedungdung	Jumlah gedung kantor dan rumah dinas yang dipelihara	2 Unit	9,000,000,-	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Kedungdung	Jumlah gedung kantor dan rumah dinas yang dipelihara	2 Unit	9,000,000,-
7.01.01.2.13	Penataan Organisasi		Presentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100%	652,097,-	Penataan Organisasi		Presentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100%	652,097,-
7.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kec. Kedungdung	a. Jumlah Dokumen IKM b. Jumlah promosi pelayanan publik yang diikuti	1 Dok 3 Keg	652,097,-	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kec. Kedungdung	c. Jumlah Dokumen IKM d. Jumlah promosi pelayanan publik yang diikuti	1 Dok 3 Keg	652,097,-
7.01.02	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		a. Presentase Rekomendasi Administrasi Pelayanan Umum yang Ditindak-lanjuti Tepat Waktu b. Presentase Pengaduan Masyarakat yang ditindak-	a. 100% b. 100%	3,867,768,-	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		c. Presentase Rekomendasi Administrasi Pelayanan Umum yang Ditindak-lanjuti Tepat Waktu d. Presentase Pengaduan Masyarakat yang ditindak-	c. 100% d. 100%	3,867,768,-

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2023					HASIL ANALISA KEBUTUHAN KECAMATAN KEDUNG DUNG TAHUN 2023				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
			lanjuti					lanjuti		
7.01.02.2.0 4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat		Jumlah Pelayanan Administrasi Umum yang Diproses	5 Keg	3,867,768,-	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat		Jumlah Pelayanan Administrasi Umum yang Diproses	5 Keg	3,867,768,-
7.01.02.2.0 4.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non-Perizinan	Kec. Kedung dung	Persentase layanan administrasi umum yang diproses tepat waktu	100%	3,867,768,-	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non-Perizinan	Kec. Kedung dung	Persentase layanan administrasi umum yang diproses tepat waktu	100%	3,867,768,-
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan	64%	58,883,857,-	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan	64%	58,883,857,-
7.01.03.2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Terlaksananya Kegiatan Pemnberdayaan Desa	2 Keg	58,883,857,-	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Terlaksananya Kegiatan Pemnberdayaan Desa	2 Keg	58,883,857,-
7.01.03.2.0 1.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Kedung dung	a. Jumlah dokumen Musrenbangcam yang Dihasilkan b. Jumlah Musrenbangcam yang dilaksanakan c. Jumlah Pra-Musrenbangcam yang Dilaksanakan	a. 1 Dok b. 1 Kali c. 1 Kali	18,330,404,-	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Kedung dung	d. Jumlah dokumen Musrenbangcam yang Dihasilkan e. Jumlah Musrenbangcam yang dilaksanakan f. Jumlah Pra-Musrenbangcam yang Dilaksanakan	d. 1 Dok e. 1 Kali f. 1 Kali	18,330,404,-
7.01.03.2.0 1.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kedung dung	a. Jumlah desa binaan PKK b. Jumlah rapat bulanan PKK di kecamatan	a. 2 Desa b. 12 Bln	40,553,453,-	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kedung dung	c. Jumlah desa binaan PKK d. Jumlah rapat bulanan PKK di kecamatan	c. 2 Desa d. 12 Bln	40,553,453,-
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan	64%	6,720,000,-	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan	64%	6,720,000,-
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban		Terlaksanananya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	12 Bln	6,720,000,-	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban		Terlaksanananya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	12 Bln	6,720,000,-

Kode	RANCANGAN AWAL RKPd KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2023					HASIL ANALISA KEBUTUHAN KECAMATAN KEDUNDUNG TAHUN 2023				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
	Ketertiban Umum					Ketertiban Umum				
7.01.04.2.01.01	Sinergisitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Kedungdung	a. Jumlah Poskamling yang Aktif b. Jumlah Siskamling yang Aktif	a. 18 Desa b. 18 Desa	6,720,000,-	Sinergisitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Kedungdung	c. Jumlah Poskamling yang Aktif d. Jumlah Siskamling yang Aktif	c. 18 Desa d. 18 Desa	6,720,000,-
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan	64%	18,876,796,-	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan	64%	18,876,796,-
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18 Desa	18,876,796,-	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18 Desa	18,876,796,-
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Kedungdung	Jumlah desa yang dilakukan evaluasi APBDesnya	18 Desa	0,-	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Kedungdung	Jumlah desa yang dilakukan evaluasi APBDesnya	18 Desa	0,-
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Kedungdung	Jumlah desa yang dilakukan pembinaan administrasinya	18 Desa	4,676,796,-	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Kedungdung	Jumlah desa yang dilakukan pembinaan administrasinya	18 Desa	4,676,796,-
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Kedungdung	Jumlah desa yang melaksanakan monitoring aset desa	14 Desa	14,200,000,-	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Kedungdung	Jumlah desa yang melaksanakan monitoring aset desa	18 Desa	14,200,000,-

Hasil analisa menunjukkan bahwa semua program dan kegiatan yang dijabarkan di Rancangan Awal RKPD 2023 sudah sesuai kebutuhan Program dan Kegiatan Kecamatan Kedungdung Tahun 2023.

2.8 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi maupun perguruan tinggi. Berdasarkan hasil telaahan data dan informasi informasi dari penelitian lapangan serta pengamatan pelaksanaan musrenbang Kecamatan. Uraian dari kajian tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kecamatan Kedungdung Tahun 2023**

Perangkat Daerah : Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Usulan Program dan Kegiatan yang diusulkan Kecamatan Kedungdung pada dasarnya adalah sebagai implementasi dan menunjang pada pelaksanaan pelayanan publik secara umum, sehingga pada bab ini usulan Program dan Kegiatan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan nasional Tahun 2023 tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah **(RKP) Tahun 2023** dengan Tema **“Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur dalam Rangka Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia guna mendukung Daya Saing Daerah menuju Sampang Hebat Bermartabat”**.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Kedungdung mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Penyusunan dan perumusan program serta kebijakan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan pelayanan masyarakat di lingkungan Kecamatan;
- b. Pengelolaan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati;
- c. Pemberian pelayanan tata usaha keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
- d. Pengelolaan penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan pembinaan keagrariaan serta pembinaan politik dalam negeri;
- e. Pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan kegiatan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan pelayanan masyarakat di lingkungan Kecamatan;
- f. Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- g. Pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan fasilitasi penyelesaian pengaduan masyarakat di lingkungan Kecamatan;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi-instansi di wilayah Kecamatan;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

Adapun sinkronisasi prioritas pembangunan daerah, provinsi dan pusat dapat dilihat pada tabel 3.1. berikut:

Tabel 3.1
Indikator Kinerja Daerah Berdasarkan Urusan Perangkat Daerah Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Target RKP Tahun 2023	Target Nasional Tahun 2023
1	Presentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	95	
2	Indeks Desa Membangun	(indeks)	0,722	5.444 desa
3	Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik	%	94,44	13,494 orang
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	(nilai)	82	

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Kecamatan Kedungdung Tahun 2023 haruslah konsisten dan selaras dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kedungdung yang telah dituangkan dalam Renstra Perubahan Kecamatan Kedungdung Tahun 2019-2024. Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Kedungdung pada Tahun 2023 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang Tahun 2023

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023
1	Tujuan: Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	Indeks Desa Membangun	68
	Sasaran: Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Desa	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	66
2	Tujuan: Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	82
3	Tujuan: Meningkatnya tata kelola pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	100
	Sasaran: Meningkatnya persentase pemerintahan desa yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik	Persentase kualitas tata kelola pemerintahan desa	100
		Jumlah desa yang dievaluasi APBDesnya	18
		Jumlah desa yang tertib administrasinya	18
4	Tujuan: Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik	Persentase penurunan gangguan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum	20

	Sasaran: Menurunnya gangguan kamtibmas	Persentase linmas di desa yang aktif	20
--	--	--------------------------------------	----

3.3 Program dan Kegiatan

3.3.1 Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang Tahun 2023

Dalam merumuskan program kegiatan Kecamatan Kedungdung mempertimbangkan beberapa faktor penting. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan salah satunya yaitu pencapaian visi dan misi kepala daerah. Merujuk pada RPJMD Kabupaten Sampang, Kecamatan Kedungdung mendukung pada pencapaian beberapa misi yakni sebagai berikut:

1. Misi 2 yaitu **“Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif”**;
2. Misi 4 yaitu **“Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik”**;
3. Misi 5 yaitu **“Mewujudkan kehidupan harmonisasi masyarakat yang waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu”**.

3.3.2 Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Sebagaimana telah tertuang dalam Renstra Kecamatan Kedungdung Tahun 2019-2024, Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang mendukung pada pencapaian misi 4 RPJMD Kabupaten Sampang serta mendukung pada pencapaian sasaran yakni sebagai berikut:

1. Sasaran 1 yaitu Meningkatkan kemajuan dan kemandirian desa;
2. Sasaran 2 yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Sasaran 3 yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa;
4. Sasaran 4 yaitu Meningkatkan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik.

Program tersebut kemudian dikompilasikan dengan hasil analisa kebutuhan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya sehingga perumusan rencana program

dan kegiatan Kecamatan Kedungdung Tahun 2023 sebagaimana terlampir sesuai dengan hasil entry rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Kedungdung Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 pada sistem aplikasi <https://e-planning.sampangkab.go.id/>.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja Perangkat Daerah

Kecamatan Kedungdung mengampu Urusan Kewilayahan, Program Kecamatan Kedungdung pada Tahun 2023 mendukung prioritas pembangunan “**Prioritas 4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik didukung Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Percepatan Reformasi Birokrasi**” sebagaimana tertuang pada RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2023. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Kedungdung dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Kedungdung Tahun 2023**

Kode	RANCANGAN KERJADAN PENDANAAN KECAMATAN KEDUNGUNG TAHUN 2023				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Baik dan Tepat Waktu	100%	3,216,141,092,-
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Presentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu	100%	6,399,259,-
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Kedungdung	a. Jumlah Dokumen Renja SKPD b. Jumlah Dokumen Renstra SKPD	2 Dok	1,995,438,-
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Kedungdung	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 Dok	1,057,428,-
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Kedungdung	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dok	345,420,-
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kec. Kedungdung	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dok	1,023,924,-
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kec. Kedungdung	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dok	276,130,-
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kedungdung	Jumlah Dokumen LKPJ, LPPD, dan Dokumen SAKIP SKPD	3 Dok	1,700,919,-
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Presentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu	100%	2.948,044,810,-
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kedungdung	Jumlah ASN	34 ASN	2.947.215.450,-
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Kedungdung	Jumlah ATK yang dibutuhkan	450 buah	0,-

Kode	RANCANGAN KERJADAN PENDANAAN KECAMATAN KEDUNGUNG TAHUN 2023				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		dung			
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Kedungdung	Jumlah Dokumen SPJ SKPD	12 Bulan	0,-
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Kedungdung	Jumlah Dokumen Akhir Tahun	1 Dok	628,800,-
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec. Kedungdung	Jumlah Dokumen Laporan Bulanan, Triwulan, Semester	16 Dok	205,300,-
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Presentase Aparatur yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Aparatur	100%	3,993,250,-
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kec. Kedungdung	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek/ Konsultasi/ Seminar	1 ASN	3,993,250,-
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase Pemenuhan Kebutuhan Administrsai Perkantoran	100%	66.178.943,-
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Kedungdung	Jumlah komponen instalasi listrik	146 buah	5,000,361,-
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	90 buah	6.200.000,-
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Kedungdung	Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga yang disediakan	148 buah	0,-
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah kebutuhan alat tulis kantor	249 buah	4,999,232,-
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Kedungdung	Jumlah barang cetak dan penggandaan	5275 lembar	3,418,100,-
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Kedungdung	Jumlah pemenuhan bahan bacaan	12 Bulan	1.800.000,-
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Kedungdung	Jumlah pemenuhan kebutuhan mamin tamu	60 ok	4,800,000,-
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Kedungdung	a. Jumlah Mamin rapat dinas b. Jumlah rapat koordinasi dalam daerah yang diikuti c. Jumlah rapat koordinasi luar daerah yang diikuti	420 ok 108 ok 5 ok	39,961,250,-
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Presentase sarana dan prasaran aparatur dalam kondisi baik	100%	93,815,920,-
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Kedungdung	Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang disediakan	1 unit	66.000.000,-
7.01.01.2.07.07	Pengadaan Mebel	Kec.	Jumlah Meubelair yang diadakan	22 unit	0,-

Kode	RANCANGAN KERJADAN PENDANAAN KECAMATAN KEDUNG DUNG TAHUN 2023				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6
05		Kedung dung			
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Kedung dung	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	4 Unit	27,815,920,-
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	74.136.813,-
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Kec. Kedung dung	Jumlah surat terkirim	500 Surat	2.421,813,-
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Kedung dung	Pemenuhan kebutuhan air, listrik dan internet	12 Bulan	29,715,000,-
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Kedung dung	Jumlah tenaga kebersihan dan Penjaga Malam	48 ob	42.000.000,-
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Kedung dung	Presentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	22,920,000,-
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Kedung dung	Jumlah kendaraan dinas yang memperoleh jasa perizinan	11 Unit	3,150,000,-
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Kec. Kedung dung	Jumlah Meubelair yang dipelihara	20 Unit	2.720.000,-
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Kedung dung	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	24 Unit	8.050.000,-
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Kedung dung	Jumlah gedung kantor dan rumah dinas yang dipelihara	2 Unit	9,000,000,-
7.01.01.2.13	Penataan Organisasi		Presentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100%	652,097,-
7.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kec. Kedung dung	a. Jumlah Dokumen IKM b. Jumlah promosi pelayanan publik yang diikuti	1 Dok 3 Keg	652,097,-
7.01.02	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		a. Presentase Rekomendasi Administrasi Pelayanan Umum yang Ditindak-lanjuti Tepat Waktu b. Presentase Pengaduan Masyarakat yang ditindak-lanjuti	a. 100% b. 100%	3,867,768,-
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat		Jumlah Pelayanan Administrasi Umum yang Diproses	5 Keg	3,867,768,-
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non-	Kec. Kedung dung	Persentase layanan administrasi umum yang diproses tepat waktu	100%	3,867,768,-

Kode	RANCANGAN KERJADAN PENDANAAN KECAMATAN KEDUNDUNG TAHUN 2023				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6
	Perizinan				
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan	64%	58,883,857,-
7.01.03.2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Terlaksananya Kegiatan Pemnberdayaan Desa	2 Keg	58,883,857,-
7.01.03.2.0 1.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Kedungdung	a. Jumlah dokumen Musrenbangcam yang Dihasilkan b. Jumlah Musrenbangcam yang dilaksanakan c. Jumlah Pra-Musrenbangcam yang Dilaksanakan	a. 1 Dok b. 1 Kali c. 1 Kali	18,330,404,-
7.01.03.2.0 1.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kedungdung	a. Jumlah desa binaan PKK b. Jumlah rapat bulanan PKK di kecamatan	a. 2 Desa b. 12 Bln	40,553,453,-
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan	64%	6,720,000,-
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	12 Bln	6,720,000,-
7.01.04.2.01. 01	Sinergisitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Kedungdung	a. Jumlah Poskamling yan Aktif b. Jumlah Siskamling yang Aktif	a. 18 Desa b. 18 Desa	6,720,000,-
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan	64%	18,876,796,-
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18 Desa	18,876,796,-
7.01.06.2.01. 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Kedungdung	Jumlah desa yang dilakukan evaluasi APBDesnya	18 Desa	0,-
7.01.06.2.01. 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Kedungdung	Jumlah desa yang dilakukan pembinaan administrasinya	18 Desa	4,676,796,-
7.01.06.2.01. 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Kedungdung	Jumlah desa yang melaksanakan Pilkades	14 Desa	14,200,000,-
					3,305,489,513

Pada Tahun 2023 Kecamatan Kedungdung akan melaksanakan kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp. 3.304,489,513,-** Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung dan melaksanakan **5 program dan 12 kegiatan dengan 37 sub kegiatan**. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yaitu di Kecamatan Kedungdung dan lingkup Kabupaten Sampang.

4.2 Inovasi Daerah Dalam Rangka Mendukung Prioritas Pembangunan Kabupaten Sampang Tahun 2022

Inovasi Kecamatan sebagai bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan merupakan terobosan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Secara teknis inovasi kecamatan ditempuh untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi serta untuk mempercepat pencapaian target kinerja pemerintahan. Selanjutnya inovasi yang digagas akan dilaksanakan dan dikembangkan pada Tahun 2023 dalam rangka mempercepat pencapaian target kinerja dan/atau mengatasi persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan antara lain :

1. UTER KEKED (ULASAN TERBARU KECAMATAN KEDUNGUNG)

Inovasi UTER KEKED ini merupakan sebuah solusi dalam penyampaian informasi di masa pandemi saat ini. Alasan munculnya inovasi tersebut adalah melihat keadaan secara nyata bahwa sebagian besar masyarakat melakukan aktivitasnya di rumah melalui aplikasi pendukung kegiatan sehari-hari dan media sosial yang mereka miliki. Mereka memergunakannya untuk melakukan kegiatan di segala macam sektor mulai dari sektor pendidikan, sektor perdagangan atau jual beli, sektor kesehatan dan lain sebagainya. Dengan adanya inovasi UTER KEKED diharapkan membantu masyarakat yang ingin mengetahui informasi terkait pelayanan publik di Kecamatan Kedungdung.

2. BIDADARI KE DESA (Pembinaan dan Pendampingan Administrasi ke Desa)

Bidadari ke Desa merupakan salah satu inovasi yang telah berjalan secara konsisten. Inovasi ini berfokus pada pembinaan serta pendampingan kepada aparatur desa agar kegiatan administrasi pemerintahan desa menjadi sistematis. Pembinaan dan pendampingan nantinya tidak hanya memberikan pengarahan dalam

pengisian administrasi desa tetapi juga memperjelas tugas setiap jabatan yang ada di desa agar tidak tumpang tindih. Administrasi Pemerintahan Desa dapat berjalan dengan baik apabila kualitas sumber daya manusia yang melaksanakan dan menerapkan administrasi Desa handal dan memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas yang diberikan.

3. GEPENGGAN KEDUNGDUNG (Gerakan Penghijauan Kecamatan Kedungdung)

Inovasi “GEPENGGAN KEDUNGDUNG” yakni gerakan penghijauan untuk lahan yang ada di Kantor Kecamatan Kedungdung. Inovasi ini diusulkan di pertengahan tahun 2021 dan baru dilaksanakan di awal tahun 2022. Gerakan penghijauan ini dimulai dengan melakukan penghijauan di sekitar rumah dinas dengan menanam sayur – sayuran. Lahan disekitar rumah dinas yang masuk ke dalam kawasan Kecamatan Kedungdung ini nantinya juga dibudidayakan agar menjadi salah satu produk unggulan di Kecamatan Kedungdung serta untuk menambahkan unsur keindahan.

4. TAMBANG MINERBA (Tambahkan Penghasilan melalui Minuman Herbal)

Tim penggerak PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan yang memiliki peranan sebagai perencana, penggerak, pelaksana, pengendali dan fasilitator untuk masing – masing tingkatan pemerintahan agar program PKK dapat terlaksana dengan baik. Untuk pengembangan ekonomi kreatif sendiri tim PKK menyediakan wadah penerima usulan melalui POKJA II yang berkaitan dengan bidang pendidikan dan keterampilan serta pengembangan kehidupan berkoperasi. Di awal tahun 2021 melalui Pokja II TP PKK Kecamatan Kedungdung muncullah inovasi minuman herbal “KEMAJET”. Minuman hebal ini dibuat dari bahan – bahan alami terdiri atas Kemangi, Jeruk Nipis dan Telasih. Salah satu bahan produksinya yaitu kemangi diambil langsung dari tumbuhan kemangi yang tumbuh liar di daerah yang ada di Kecamatan Kedungdung. Pemanfaatan kemangi ini bisa mengurangi biaya produksi ditengah kondisi ekonomi yang menurun. Selain itu bahan produksi lain bisa langsung dibeli di pasar induk Kecamatan Kedungdung yang secara tidak langsung membantu pemulihan perekonomian pasar akibat dampak covid-19.

5. KERAM NAK IBU-IBU (KECAMATAN RAMAH ANAK DAN IBU MENYUSUI)

Inovasi ini muncul sebagai salah satu bentuk pelayanan publik yang dikhususkan bagi anak – anak, ibu hamil serta menyusui di Kecamatan Kedungdung. Bentuk dari inovasi tersebut adalah dengan adanya ruang laktasi bagi mereka. Selama ini fasilitas publik tersebut tidak ada di kecamatan sehingga seringkali ibu menyusui terutama merasakan kesulitan untuk *mengASIhi* bayi mereka. Dengan adanya inovasi ini diharapkan memberikan ruang tersendiri yang dapat digunakan oleh seluruh ibu hamil dan menyusui serta balita di Kecamatan Kedungdung yang menggunakan fasilitas di kecamatan.

BAB V PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang disusun sejalan dengan Tema RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2023 yaitu **“Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur dalam Rangka Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia guna mendukung Daya Saing Daerah menuju Sampang Hebat Bermartabat”**, dan penjabaran dari tujuan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang yang tertuang dalam Renstra antara lain:

1. Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa;
4. Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik.

Hasil evaluasi atas Rencana Kerja Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang tahun 2022 belum dapat ditunjukkan karena tahun anggaran 2022 masih berjalan.

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Kecamatan Kedungdung Tahun 2023 haruslah konsisten dan selaras dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kedungdung yang telah dituangkan dalam Renstra Perubahan Kecamatan Kedungdung Tahun 2019-2024. Adapun sasaran Kecamatan Kedungdung adalah :

1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di desa;
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa;
3. Meningkatnya persentase pemerintahan desa yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik;
4. Menurunnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pada Tahun 2023 Kecamatan Kedungdung akan melaksanakan Urusan Fungsi Penunjang Lainnya dengan total anggaran **Rp. 3.304,489,513,-** Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung dan melaksanakan **5 program dan 12 kegiatan**. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yaitu di Kecamatan Kedungdung dan lingkup Kabupaten Sampang.

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2023, maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaan dan tindak lanjut supaya program dan kegiatan yang telah di rencanakan sesuai dengan harapan pembangunan. Adapun beberapa kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut adalah sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang haruslah berpedoman kepada RKPD dan disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional dan propinsi supaya perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan selaras dan bersinergi;
2. Dokumen Rencana Kerja ini kemudian menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023;
3. Dokumen Rencana Kerja ini digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat tahunan.

BUPATI SAMPANG,

H. SLAMET JUNAI DI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024

Jika pendanaan berasal dari APBD maka pada kolom catatan penting diberi keterangan : DAU, DAK, atau DBHCHT

URUSAN : URUSAN PEMERINTAHAN
Perangkat Daerah : KECAMATAN KEDUNGUNG

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023				Cat. Penting	Prakiraan Maju Rencana Kegiatan Tahun 2024		
									Target Capaian Kinerja	APBD	APBD Prop.	APBN		Jumlah (6+7+8)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
URUSAN	BIDANG URUSAN	KODE PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN											
X																
X	XX															
X	XX	7.01.06.				KECAMATAN KEDUNGUNG										
X	XX	7.01.06.	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Kecamatan Kedungdung	100%	3,216,141,092	-	-	3,216,141,092	DAU	100%	4,068,000,000
X	XX	7.01.06.	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6,399,259	-	-	6,399,259			28,500,000
X	XX	7.01.06.	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun		2 dokumen	1,995,438	-	-	1,995,438		3 dokumen	4,000,000
X	XX	7.01.06.	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun		1 dokumen	1,057,428	-	-	1,057,428		1 dokumen	5,000,000
X	XX	7.01.06.	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun		1 dokumen	345,420	-	-	345,420		1 dokumen	4,000,000
X	XX	7.01.06.	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun		1 dokumen	1,023,924	-	-	1,023,924		1 dokumen	4,000,000
X	XX	7.01.06.	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang disusun		1 dokumen	276,130	-	-	276,130		1 dokumen	5,000,000
X	XX	7.01.06.	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKPJ, LPPD, dan dokumen SAKIP SKPD		3 dokumen	1,700,919	-	-	1,700,919		3 dokumen	6,500,000
X	XX	7.01.06.	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2,948,044,810	-	-	2,948,044,810			3,417,700,000
X	XX	7.01.06.	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN		34 ASN	2,947,212,710	-	-	2,947,212,710		34 ASN	3,400,000,000
X	XX	7.01.06.	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan ATK		450 buah	0	-	-	0		450 buah	6,800,000
X	XX	7.01.06.	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen SPJ SKPD		12 bulan	0	-	-	0		12 bulan	3,000,000
X	XX	7.01.06.	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan Akhir Tahun		1 dokumen	626,800	-	-	626,800		1 dokumen	3,900,000
X	XX	7.01.06.	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD		16 dokumen	205,300	-	-	205,300		16 dokumen	4,000,000

X	XX	7.01.06.	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				3,993,250	-	-	3,993,250			8,000,000
X	XX	7.01.06.	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	1 ASN	3,993,250	-	-	3,993,250		1 ASN	8,000,000	
X	XX	7.01.06.	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			66,178,943	-	-	66,178,943			93,900,000	
X	XX	7.01.06.	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	146 buah	5,000,361	-	-	5,000,361		146 buah	5,100,000	
X	XX	7.01.06.	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	90 buah	6,200,000	-	-	6,200,000		220 buah	11,000,000	
X	XX	7.01.06.	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan Peralatan Rumah tangga yng disediakan	148 buah	0	-	-	0		220 buah	11,000,000	
X	XX	7.01.06.	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah kebutuhan Alat Tulis Kantor	249 buah	4,999,232	-	-	4,999,232		220 buah	11,000,000	
X	XX	7.01.06.	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	5275 lembar	3,418,100	-	-	3,418,100		10000 lembar	6,600,000	
X	XX	7.01.06.	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pemenuhan bahan bacaan	12 bulan	1,800,000	-	-	1,800,000		12 bulan	1,800,000	
X	XX	7.01.06.	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah pemenuhan kebutuhan mamin tamu	60 OK	4,800,000	-	-	4,800,000		60 OK	2,400,000	
X	XX	7.01.06.	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dalam daerah yang diikuti	108 kali	39,961,250	-	-	39,961,250		108 kali	45,000,000	
		7.01.06.					Jumlah rapat koordinasi luar daerah yang diikuti	5 kali		-	-	0		5 kali		
		7.01.06.					Jumlah pemenuhan kebutuhan mamin rapat dinas	420 OK		-	-	0		420 ok		
		7.01.06.					Jumlah kebutuhan BBM	605 liter		-	-	0		700 liter		
X	XX	7.01.06.	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			93,815,920	-	-	93,815,920			166,000,000	
X	XX	7.01.06.	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas roda 4 yang disediakan	1 unit	66,000,000	-	-	66,000,000		1 unit	66,000,000	
X	XX	7.01.06.	01	2.07	05	Pengadaan Mebeler	Jumlah mebel yang diadakan	22 umit	0	-	-	0		22 umit	35,000,000	
X	XX	7.01.06.	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	4 unit	27,815,920	-	-	27,815,920		4 unit	65,000,000	
X	XX	7.01.06.	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			74,136,813	-	-	74,136,813			74,000,000	
X	XX	7.01.06.	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim	500 surat	2,421,813	-	-	2,421,813		500 surat	3,000,000	
X	XX	7.01.06.	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pemenuhan kebutuhan air, listrik dan internet	12 bulan	29,715,000	-	-	29,715,000		12 bulan	35,000,000	
X	XX	7.01.06.	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan dan Penjaga Malam	48 ob	42,000,000	-	-	42,000,000		48 ob	36,000,000	
X	XX	7.01.06.	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			22,920,000	-	-	22,920,000			243,900,000	
X	XX	7.01.06.	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang memperoleh jasa perizinan	11 unit	3,150,000	-	-	3,150,000		11 unit	6,000,000	
X	XX	7.01.06.	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebeler	Jumlah mebel yang dipelihara	34 ASN	2,720,000	-	-	2,720,000		34 ASN	3,400,000	
X	XX	7.01.06.	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang di pelihara	24 unit	8,050,000	-	-	8,050,000		24 unit	9,500,000	

X	XX	7.01.06.	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara, Jumlah rumah dinas yang dipelihara		2 unit	9,000,000	-	-	9,000,000		2 unit	225,000,000
X	XX	7.01.06.	01	2.13		Penataan Organisasi				652,097	-	-	652,097			36,000,000
X	XX	7.01.06.	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen IKM, Jumlah promosi pelayanan publik yg diikuti			652,097	-	-	652,097			36,000,000
X	XX	7.01.06.	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Kecamatan Kedungdung		3,867,768	-	-	3,867,768	DAU		7,000,000
X	XX	7.01.06.	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan DI Kecamatan				3,867,768	-	-	3,867,768			7,000,000
X	XX	7.01.06.	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase layanan administrasi umum yang diproses tepat waktu		100%	3,867,768	-	-	3,867,768		100%	7,000,000
X	XX	7.01.06.	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Kecamatan Kedungdung		58,883,857	-	-	58,883,857	DAU		77,000,000
X	XX	7.01.06.	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				58,883,857	-	-	58,883,857			77,000,000
X	XX	7.01.06.	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musrenbang di Desa	Pelaksanaan Pra Musrenbangcam, Musrenbangcam, Laporan Hasil Musrenbangcam		- 1 kali - 1 kali - 1 dokumen	18,330,404	-	-	18,330,404		68%	35,000,000
X	XX	7.01.06.	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa Binaan PKK		2 Desa	40,553,453	-	-	40,553,453		68%	42,000,000
X	XX	7.01.06.	04	2.01		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN		Kecamatan Kedungdung		6,720,000	-	-	6,720,000	DAU		8,000,000
X	XX	7.01.06.	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban				6,720,000	-	-	6,720,000			8,000,000
X	XX	7.01.06.	04	2.01	01	Sinergitas dengan POLRI, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah poskamling yang aktif dan jumlah siskamling yang aktif		18 Desa	6,720,000	-	-	6,720,000		100%	8,000,000
X	XX	7.01.06.	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Kecamatan Kedungdung		18,876,796	-	-	18,876,796	DAU		25,000,000
X	XX	7.01.06.	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemdes			100%	18,876,796	-	-	18,876,796		100%	25,000,000
X	XX	7.01.06.	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala desa	Jumlah desa yang dilakukan evaluasi APBDesnya		18 Desa	0	-	-	0		100%	22,000,000
X	XX	7.01.06.	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dilakukan pembinaan administrasinya		18 Desa	4,676,796	-	-	4,676,796		100%	3,000,000
X	XX	7.01.06.	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan pilkades		0 Desa	14,200,000	-	-	14,200,000		100%	
						JUMLAH				3,304,489,513	-	-	3,304,489,513			4,185,000,000

3,587,469,161
282,979,648

Sampang, 04 Maret 2022

CAMAT KEDUNGUNG

MOHAMAD SULHAN, S. Sos. MM
NIP. 19721017 199903 1 003